

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Inspektorat daerah atau Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP), memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan pemerintahan di daerah berdasarkan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pendampingan. Salah satu kewajiban Pejabat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah mengkaji Laporan Keuangan (LK) sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya, pasal 57 PP Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa Inspektorat Provinsi, Kabupaten, atau Kota meninjau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebelum disampaikan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota kepada BPK.

Dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, disebutkan bahwa reviu kembali laporan keuangan oleh APIP dilakukan untuk menjamin keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Reviu ini dimaksudkan untuk memberikan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebelum disampaikan oleh pejabat pengelola keuangan kepada Kepala Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 yang mengatur pedoman pelaksanaan reviu LKPD menyatakan bahwa tujuan reviu LKPD adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang memadai. Dengan demikian, peran Inspektorat ketika melakukan reviu menjadi sangat penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan akuntabel dalam rangka menjalankan amanat peraturan perundang-undangan.

Inspektorat Kota Banjarbaru merupakan bagian dari Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk mengkaji laporan keuangan dengan memberikan pendampingan penyusunan laporan keuangan. Tujuan dari kajian tersebut adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yang memiliki informasi penting bagi kepala daerah sebagai pengguna anggaran untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu periode pelaporan. Selain itu, kajian ini juga berguna untuk mengendalikan seluruh aset daerah, kewajiban daerah, dan pemerataan dana pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kepentingan pembangunan daerah. Laporan keuangan yang berkualitas juga menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pekerjaan inspektorat daerah dalam melakukan reviu laporan keuangan oleh Inspektorat Kota Banjarbaru. Oleh karena itu, penulis memilih judul kajian "EVALUASI PRAKTIK REVIU LAPORAN KEUANGAN OLEH INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU".

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana cara kerja Inspektorat Kota Banjarbaru dalam melakukan reviu laporan keuangan?
2. Bagaimana penerapan aturan tertulis dalam praktik reviu laporan keuangan oleh Inspektorat Kota Banjarbaru?
3. Bagaimana saja praktik akuntansi dalam penyusunan reviu laporan keuangan oleh Inspektorat Kota Banjarbaru?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

1. Membandingkan cara kerja Inspektorat Kota Banjarbaru dalam mengkaji laporan keuangan dengan *best practice* secara literasi
2. Mengetahui penerapan aturan tertulis dalam praktik reviu laporan keuangan oleh Inspektorat Kota Banjarbaru.
3. Mengetahui praktik akuntansi dalam penyusunan reviu laporan keuangan oleh Inspektorat Kota Banjarbaru.

## **1.4. Ruang Lingkup Penulisan**

Tulisan ini berfokus pada praktik reviu laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020 sebelum disampaikan oleh Walikota kepada BPK.

## **1.5. Manfaat Penulisan**

Tulisan ini diharapkan memiliki pengaruh yang baik secara teoritis dan praktis, yang dijabarkan sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Menjadi bahan penelitian lanjutan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang audit, khususnya tentang peran inspektorat daerah

sebagai pengawas internal dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mengkaji Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

## 2. Manfaat Praktis

- a). Sebagai wadah bagi penulis untuk mengimplementasikan pengetahuan tentang praktik akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
- b). Bahan acuan pemerintah mengenai kendala internal dan eksternal yang dapat menghambat inspektorat daerah dalam meningkatkan kualitas LKPD
- c). Menjadi sumber daya pendidikan yang menambah pemahaman dan wawasan tentang revidi laporan keuangan bagi masyarakat.

### **1.6. Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan penulis untuk memperoleh data yang digunakan dalam rangka mendukung penulisan Makalah Tugas Akhir (KTTA) terdiri dari dua metode, yaitu:

#### 1. Metode Studi Literatur

Penulis menggunakan metode ini dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, arsip, majalah, artikel, jurnal, dan dokumen yang relevan dengan masalah yang sedang dipelajari baik di media cetak maupun elektronik. Informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan ini digunakan sebagai acuan yang valid untuk memperoleh landasan teori atas permasalahan yang akan dibahas dalam KTTA ini.

## 2. Metode Studi Lapangan

Metode studi lapangan merupakan metode pengumpulan data dengan datang secara langsung ke lokasi objek penelitian untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dan/atau analisis dokumen dalam objek penulisan.

### **1.7. Sistematika Penulisan KTTA**

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis memuat gambaran umum tentang permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini, yang disusun berdasarkan masing-masing subbagian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan KTTA.

#### **BAB II. LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini menjelaskan teori dan aturan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, seperti Standar Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan PMK Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI.

#### **BAB III. METODE DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, menjelaskan teori-teori yang mendasari pembahasan topik yang dimaksud, penerapan teori dibandingkan dengan realitas di lapangan, serta fakta-fakta yang diperoleh oleh penulis. Selanjutnya dilakukan pembahasan hasil pengumpulan dan pengolahan data secara tematik dengan beberapa pertanyaan terkait yang telah disusun, yaitu membandingkan kesesuaian antara

praktik pada objek tulisan dengan teori atau aturan terkait yang berlaku .

#### BAB IV. SIMPULAN

Dalam bab ini penulis menarik kesimpulan atas permasalahan yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya yang dapat menjawab perumusan permasalahan dalam tulisan ini.